

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KUALITAS PELATIHAN, DAN LAMA PENGALAMAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN ACEH UTARA

Mukhlisul Muzahid
Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aimed to test empirically the effect of educational level, quality of training, and long work experience employee either simultaneously or partially on the quality of financial reporting unit (SKPD) in North Aceh district. The method used in this study is a census method. The study was conducted in 35 work units (SKPD) in the town of Lhokseumawe. The data used is primary data and data collection is done through through questionnaires. The analytical method used is descriptive analysis, and hypothesis testing methods used path analysis. The results showed that simultaneous levels of education, quality of training, and the long experience of employees affect the quality of financial reporting unit (SKPD). Partially level of education, quality of training, and long work experience of each employee has a positive effect on the quality of financial reporting unit (SKPD).

Keywords: educational level, quality of training, long work experience employee, and quality of financial reporting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Penelitian dilakukan pada 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kota Lhokseumawe. Data yang digunakan adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan melalui melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, kemudian pengujian hipotesis dipakai metode analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Keywords : Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja, dan kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tentang Pemerintahan Daerah, serta undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan sistem pemerintahan yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik dan menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan agar sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 tersebut lebih menekankan pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan prinsip – prinsip

demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan serta pengembangan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat (DPRD). Selain itu juga kedua undang-undang tersebut memberikan perubahan terhadap legalitas formal bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, selain itu SKPD juga akan menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun setiap bulan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, yang menitik beratkan pada pola transparansi serta akuntabilitas jelas terlihat bahwa pemerintah menginginkan adanya pola penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak hanya berusaha akan melibatkan semua komponen masyarakat tetapi hasil akhir dari semua itu tertuju untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di daerahnya. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni: (1) Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap, (2) Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *variability*, netralitas, (3) Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. (4) Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing unit atau satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka diperlukan pengendalian yang merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh

pimpinan organisasi, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Dengan adanya mekanisme pengendalian yang efektif pada unit atau satuan kerja perangkat daerah, maka tujuan dan kinerja satuan kerja perangkat daerah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan akan dapat dicapai.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemilihan pemerintahan kabupaten Aceh Utara sebagai lokasi penelitian adalah didasari pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki sebaran wilayah yang luas dan sudah melepaskan sebagian luas wilayah serta assetnya untuk pemekaran pemerintahan kota Lhokseumawe, dimana kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan kabupaten masih sangat terbatas, khususnya sumber daya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena karena banyak pegawai yang ada di pemerintah kabupaten Aceh Utara dimutasikan ke pemerintahan kota Lhokseumawe.

Fenomena lain terlihat didalam penempatan posisi pegawai di pemerintah kabupaten Aceh Utara belum dilakukan sesuai bidang keahlian, dimana masih banyak pegawai yang ditempatkan dibagian akuntansi dan pelaporan tidak berlatar belakang pendidikan formal akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara".

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara, dan 2) Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah di atas, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara, 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara.

TINJAUAN TEORITIS

Laporan Keuangan

Pemerintah memikul tanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara periodik kepada pihak internal dan eksternal sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemerintah daerah selaku pihak aparatur negara di tingkat daerah akan melaporkan kegiatannya kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut terutama kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan, pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan negara dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009: 2): Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi disusun oleh suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan. Selanjutnya dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. (Nunuy Nur Affiah, 2009: 5)

Dalam standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan akan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya digunakan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Untuk Akuntabilitas Publik

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan

keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. (Abdul Halim. 2007).

Dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/ daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri dari; 1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas (LAK) dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan, hal ini berarti setiap gubernur/ bupati/ walikota dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan (bendahara umum negara/ kuasa bendahara umum negara/ dan kuasa bendahara umum daerah/ kuasa bendahara umum daerah).

Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/ defisit selama satu periode yang disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama satu periode.

Pendidikan Formal

Secara bahasa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Malaya S. P. Hasibuan (2008: 69) mengatakan pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Soekidjo Notoatmodjo (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134) adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan.

Selain itu juga, menurut Heidjrachman (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan

ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dan menurut Siagian (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134), pengertian pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia. Henry Simamora (1999: 287) menyatakan: "Pendidikan ialah penyiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Biasanya peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik"

Pendidikan formal berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral. Dengan pendidikan formal yang memadai, staf bagian keuangan/akuntansi akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat pendidikan formal staf bagian keuangan/akuntansi dan dengan latar belakang akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan.

Kualitas Pelatihan

Pada hakekatnya kegiatan pelatihan atau *training* perlu dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Sikula dalam Sumantri (2000:2) mengartikan pelatihan sebagai: "proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu". Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan (Anwar P Mangkunegara, 2007 : 5). Sedangkan Michael J. Jucius dalam Anwar P Mangkunegara (2007 : 2) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Pelatihan mengandung makna yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan dengan pekerjaan/tugas yang dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan praktis adalah, bahwa responden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga harus bersifat praktis, (Fandi Tjiptono, dkk, 1996).

Definisi pelatihan menurut *Center for Development Management and Productivity* adalah belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para karyawan atau pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Perbedaan yang nyata dengan pendidikan, diketahui bahwa pendidikan pada umumnya bersifat filosofis, teoritis, bersifat umum, dan memiliki rentangan waktu belajar yang relatif lama dibandingkan dengan suatu pelatihan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembelajaran, mengandung makna adanya suatu proses belajar yang melekat terhadap diri seseorang. Pembelajaran terjadi karena adanya orang yang belajar dan sumber belajar yang tersedia. Dalam arti pembelajaran

merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang melakukan proses belajar.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelatihan dalam hal ini adalah proses pendidikan yang di dalamnya ada proses pembelajaran dilaksanakan dalam jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi pekerjaan di dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa "pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja mendatang".

Pengalaman Kerja

Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan, maupun juga di pemerintahan. Dengan demikian orang yang berpengalaman mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan dengan baik dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

Pengalaman dan pendidikan sering digunakan secara bersamaan, karena kombinasi antara pengalaman dan pendidikan dapat menciptakan kemampuan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Orang yang berpengalaman telah mempraktekkan teori yang pernah diperoleh dari belajar atau pendidikan. Dengan demikian perpaduan antara pengalaman dan pendidikan akan lebih meningkatkan mutu pekerjaan atau tugas-tugas dalam aktivitasnya. "Pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuni. Dengan melakukan pekerjaan secara berulang ulang, seseorang akan lebih mahir melaksanakan tugasnya dan terbuka peluang untuk memperoleh cara kerja yang lebih praktis, efisien, produktif'. (Ambar Teguh : 2004).

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan lebih memberikan kemudahan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan.

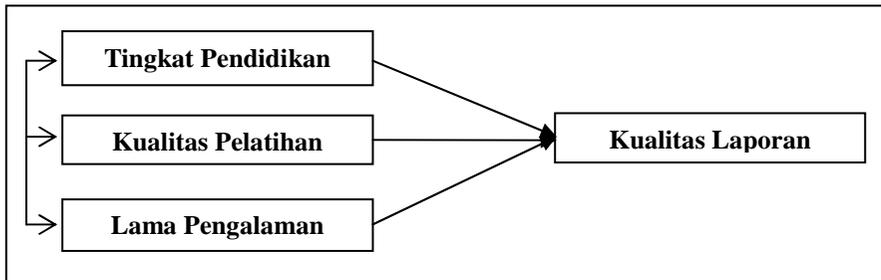
Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangannya akuntansi sektor publik telah berkembang dengan pesat, istilah akuntabilitas publik, *value for money*, reformasi sektor publik, privatisasi, *good public governance* sudah sering dibicarakan dan dibahas, isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang akhirnya merupakan tuntutan diciptakannya *good public and corporate governance*. Isu tersebut kemudian diikuti dengan reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsive dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Secara garis

besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah: (1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik; (2) Untuk alat akuntabilitas publik; (3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran mengenai tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja, serta kualitas laporan keuangan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- Hipotesis 1 : Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- Hipotesis 2 : Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- Hipotesis 3 : Kualitas pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- Hipotesis 4 : Lama pengalaman kerja pegawai secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang memberikan gambaran tentang besarnya pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jenis penelitian adalah *explanatory case study* dengan *deskriptif analitis*. *Explanatory case study* adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengujian-pengujian hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menguraikan secara tuntas dan jelas mengenai karakteristik permasalahan atau fenomena yang dihadapi, teknik yang digunakan adalah *cross sectional*. Menurut Sugiyono (2009: 8) bahwa: Teknik *cross sectional* adalah data yang dikumpulkan berasal dari subjek yang berbeda dalam kurun waktu sekali pengumpulan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan

wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan objek penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan populasi dari objek penelitian ini yaitu SKPD.

Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas atau *independent variable* dan satu variabel terikat atau *dependent variable*. Variabel bebas meliputi Tingkat Pendidikan (X_1), Kualitas Pelatihan (X_2), Lama Pengalaman Kerja (X_3), adapun variabel terikat yang diteliti adalah: Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Dalam mengukur variabel penelitian di atas, dilakukan operasionalisasi variabel yang merupakan penjabaran variabel-variabel tersebut ke dalam indikator-indikatornya. Secara rinci operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Indikator | Skala |
|-----------------------------------|--|---------|
| Tingkat Pendidikan (X_1) | <ul style="list-style-type: none">Tingkat pendidikanBidang pendidikanKualitas pendidikanKualitas kelulusan | Ordinal |
| Kualitas Pelatihan (X_2) | <ul style="list-style-type: none">Bidang pelatihanKualitas pelatihanJangka waktu pelatihan | Ordinal |
| Lama Pengalaman Kerja (X_3) | <ul style="list-style-type: none">Jangka waktu bekerjaBidang pengalaman kerjaManfaat Pengalaman kerja bidang keuangan/akuntansi. | Ordinal |
| Kualitas Laporan keuangan (Y) | <ul style="list-style-type: none">RelevanAndalDapat dibandingkanDapat dipahami | Ordinal |

Indikator-indikator dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal yang diukur berdasarkan teknik skala *likert*. Menurut Sugiyono (2009) bahwa: Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item *instrument* yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Teknik skala *likert* dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan cara memberikan nilai skor setiap item jawaban.

Populasi dan Sampel Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai entitas akuntansi. Dengan demikian, populasi target dalam penelitian ini adalah SKPD-SKPD pemerintahan kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 35 SKPD. Menurut Arikunto (2006: 130) yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sensus jenuh, dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Responden dalam

penelitian ini berjumlah 1 orang dari setiap SKPD yaitu staf bagian akuntansi yang bertugas secara langsung dalam menyusun laporan keuangan atau kepala sub bagian keuangan selaku reviewer laporan keuangan yang telah disusun, kemudian pengawai dibagian bidang (kabid) akuntansi di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) yang berjumlah 5 orang.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kuantitatif, yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan dari rumus-rumus statistik yang dipilih, sehingga dapat diketahui pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Pengujian Data

Keabsahan suatu hasil penelitian ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang valid bisa menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner merupakan hal yang penting. Guna menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan hasil penelitian, maka diperlukan pengujian yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu test maka alat test tersebut semakin tepat mengenai sasarannya (Sugiyono;2009)

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2] [n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

dimana:

- r = Korelasi Product Moment
- $\sum X_i$ = Jumlah skor item ke i, i = 1, 2, 3, , n
- $\sum Y_i$ = Jumlah skor total ke i, i = 1, 2, 3, , n
- n = Jumlah responden

Menurut Sugiyono (2009) Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat kehandalan alat ukur yang digunakan yaitu kuisioner dipersepsikan sama oleh setiap responden dan bentuk pertanyaannya menghasilkan jawaban yang realistis dari setiap responden. Uji reliabilitas data penelitian ini menggunakan metode (rumusan) koefisien *Alpha Cronbach's*. koefisien *Alpha Cronbach's* merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan dengan alasan koefisien ini menggambarkan varians dari item-item sekaligus untuk mengevaluasi *internal consistency*, dengan rumus sebagai berikut (Riduwan, 2008): Koefisien (α) ditujukan dengan:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

dimana:

- k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir
- σ_1^2 = varians total

Untuk mempermudah proses perhitungan, maka digunakan alat bantu komputer dengan *software* dengan aplikasi statistik SPSS 18 *for windows*.

Metode Analisis Data

Data ordinal yang akan dianalisis terlebih dahulu dinaikkan atau ditransformasikan tingkat kepengukurannya ke tingkat interval melalui *method of successive interval* (MSI), selanjutnya analisis data digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara, maka pengujian dilakukan dengan uji analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan *software Statistical Program for Social Science* (SPSS).

$$Y = P_{yx_1}X_1 + P_{yx_2}X_2 + P_{yx_3}X_3 + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana semua populasi menjadi responden penelitian. Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

Pengujian koefisien jalur

Setelah dihitung koefisien jalurnya maka langkah berikutnya adalah menguji arti koefisien jalur tersebut. Terdapat dua tahapan pengujian dalam analisis jalur yaitu pengujian secara keseluruhan dan pengujian secara individual. Untuk pengujian hipotesis secara simultan, statistik uji yang digunakan untuk menguji secara keseluruhan dengan menggunakan uji F, dan pengujian hipotesis secara parsial dilakukan jika pengujian secara keseluruhan H0 ditolak, berarti sekurang-kurangnya

ada sebuah $P_{yx_i} > 0$ dimana ($i=1,2,3$). Untuk mengetahui hipotesis konseptual yang diajukan, maka dilakukan pengujian secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala sub bagian keuangan/akuntansi atau pegawai dibagian pelaporan keuangan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjumlah 35 orang, serta pegawai dibagian keuangan/akuntansi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) berjumlah 5 orang yang memverifikasi laporan keuangan SKPD pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 70 eksemplar dengan tingkat pengembalian 100 persen. Berdasarkan data hasil pengolahan kuesioner, didapat profil responden dengan kategori jenis kelamin, umur, jabatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden

| No | Jumlah Responden | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1 | Jenis kelamin | | |
| | Laki-laki | 14 | 35% |
| | Perempuan | 26 | 65% |
| | Jumlah | 40 | 100% |
| 2 | Umur | | |
| | 20-30 tahun | 12 | 30% |
| | 31-40 tahun | 21 | 52% |
| | 41-50 tahun | 7 | 18% |
| | Jumlah | 40 | 100% |
| 3 | Jabatan | | |

| No | Jumlah Responden | Frekuensi | Persentase |
|----|-------------------|-----------|------------|
| | Kepala Sub Bagian | 13 | 32,5% |
| | Pegawai Staf | 27 | 67,5% |
| | Jumlah | 40 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang bekerja di bagian keuangan/akuntansi didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki, yaitu 26 perempuan atau 65% dan 14 responden laki-laki atau 35%. Dari umur responden menunjukkan bahwa rentang umur 20-30 tahun sebanyak 12 orang atau 30%, rentang umur 31-40 tahun sebanyak 21 orang atau 52% dan rentang umur 41-50 tahun sebanyak 7 orang atau 18%.

Data responden dari posisi jabatan dapat dilihat bahwa jabatan sebagai kepala sub bagian yaitu sebanyak 13 orang atau 32,5% dan jabatan sebagai pegawai staf dibagian keuangan/ akuntansi sebanyak 27 orang atau 67,5%.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas alat ukur penelitian dilakukan menggunakan pendekatan statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total variabel. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan pernyataan valid apabila nilai korelasi skor butir pernyataan dengan skor total variabelnya $\geq 0,30$. Hasil pengujian validitas untuk semua pertanyaan variabel X1, X2, X3 dan Y adalah valid, dimana nilai korelasi butir pertanyaan lebih besar 0,30.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Setelah diperoleh butir item kuesioner yang valid, ukuran lain yang harus dipenuhi suatu alat ukur adalah memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang baik (tinggi). Suatu alat ukur dikatakan andal bila alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama. Pendekatan secara statistika yang dapat digunakan untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur adalah koefisien reliabilitas. Adapun ukuran yang disarankan sebagai dasar secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel) adalah apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* maka diperoleh hasil uji reliabilitas untuk data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas

| No | Variabel | Koefisien Reliabilitas | Keterangan |
|----|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Tingkat Pendidikan (X1) | 0,829 | Reliabel |
| 2 | Kualitas Pelatihan (X2) | 0,875 | Reliabel |
| 3 | Lama Pengalaman Kerja (X3) | 0,834 | Reliabel |
| 4 | Kualitas Laporan Keuangan (Y) | 0,897 | Reliabel |

Sumber : Hasil Data Penelitian 2013

Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang baik ($r > 0.70$) sehingga dapat digunakan dalam melakukan analisis guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil uji validitas semua pernyataan valid dan reliabel, yang berarti bahwa data penelitian yang diperoleh dari instrumen yang digunakan layak digunakan mengetahui dan menguji permasalahan yang diteliti.

Hasil Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Untuk menjawab hipotesis penelitian yang diajukan maka dilakukan melalui analisis jalur (*path analysis*). Untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam analisis sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal, terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *method of successive interval* (MSI).

Perhitungan koefisien jalur dilakukan dengan menggunakan software SPSS 18. Dari hasil perhitungan analisis jalur, diperoleh koefisien jalur secara parsial dari Tingkat Pendidikan (X_1), Kualitas Pelatihan (X_2), dan Lama Pengalaman Kerja (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) seperti tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Koefisien Jalur X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y

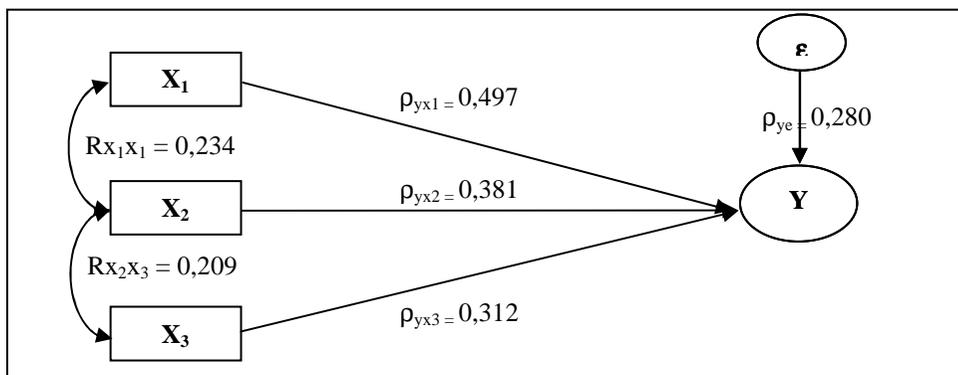
| Variabel | Koefisien Jalur |
|---------------------------------|-------------------|
| Tingkat Pendidikan (X_1) | $P_{yx1} = 0,497$ |
| Kualitas Pelatihan (X_2) | $P_{yx2} = 0,381$ |
| Lama Pengalaman Kerja (X_3) | $P_{yx3} = 0,312$ |
| Pengaruh Secara Bersamaan | $= 0,720$ |
| Pengaruh Residu | $= 0,280$ |

Sumber, Hasil Penelitian, 2013

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari tingkat pendidikan (X_1), kualitas pelatihan (X_2), dan lama pengalaman kerja (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) secara parsial maupun secara simultan. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan *Standardized Coefficients (Beta)* dari hasil perhitungan menggunakan SPSS.

Diperoleh koefisien jalur untuk tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan (ρ_{yx1}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,497, koefisien jalur untuk kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan (ρ_{yx2}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,381, dan koefisien jalur untuk lama pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan (ρ_{yx3}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,312.

$$Y = 0,497 X_1 + 0,381 X_2 + 0,312 X_3 + 0,280 \epsilon_i$$



Gambar 2
Path Diagram Hasil Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Pengujian Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan melibatkan seluruh populasi atau bersifat sensus. Untuk penelitian bersifat sensus secara statistik tidak dilakukan pengujian hipotesis statistik. Sehingga pengaruh yang diperoleh tidak dilakukan pengujian secara statistik menggunakan statistik uji t.

Hipotesis penelitian yang diajukan dijawab dengan hasil perhitungan koefisien pengaruh yang diperoleh secara simultan maupun secara parsial.

1). Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian apakah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara statistik hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YXi} \leq 0$:Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_1 : \rho_{YXi} > 0$:Terdapat pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F. Penentuan hasil pengujian (penerimaan H_1 atau penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya dengan ketentuan tolak H_0 jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Nilai F_{hitung} diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$F = \frac{(n - k - 1) \times R^2 \times (x_1 x_2 x_3)}{k \times (1 - R^2) \times (x_1 x_2 x_3)}$$

$$F = \frac{(35 - 3 - 1) \times 0,720}{3 \times (1 - 0,720)}$$

$$F = 26,57$$

Dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas $db_1 = 3$ dan $db_2 = 35-3-1 = 31$ diperoleh $F_{0,05(3;31)} = 2,920$. Karena diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($26,57 > 2,920$), maka dapat diambil kesimpulan menolak H_0 .

Tabel 5
Hasil Pengujian Secara Simultan

| Hipotesis | db | F_{hitung} | F_{tabel} | Kesimpulan Statistik |
|--|---------------------------|--------------|-------------|---|
| Tingkat pendidikan, Kualitas pelatihan, dan Lama pengalaman kerja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan | $db_1 = 3$ $db_2 = 31$ | 26,57 | 2,920 | H_0 ditolak; terdapat pengaruh Tingkat pendidikan, Kualitas pelatihan, dan Lama pengalaman kerja pegawai terhadap Kualitas laporan keuangan |

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Jadi berdasarkan pada hasil pengujian dapat disimpulkan secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

2). Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial

Setelah prosedur pengujian simultan H_0 ditolak, dan disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 secara parsial terhadap Y . Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan ditunjukkan oleh koefisien jalur (ρ_{yx1}) sebesar 0,497, (ρ_{yx2}) sebesar 0,381, dan (ρ_{yx3}) sebesar 0,312.

Koefisien jalur yang diperoleh memperlihatkan bahwa secara parsial baik X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif. Jadi dapat disimpulkan tingkat pendidikan (X_1), kualitas pelatihan (X_2), dan lama pengalaman kerja pegawai (X_3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara simultan maupun secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Koefisien determinasi sebesar 72.0% menunjukkan bahwa tingginya pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan, sementara pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 28% seperti komitmen organisasi dan regulasi pemerintah.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat pendidikan pegawai pada setiap SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara berada pada tingkat sarjana, namun demikian sudah banyak pula pegawai di setiap SKPD yang memiliki tingkat pendidikan sarjana muda atau diploma III, dan ada juga pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan magister. Sebagian pegawai di SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara memiliki bidang ilmu lulusan terakhir ekonomi pembangunan serta ada beberapa pegawai yang berlatar belakang bidang pendidikan akuntansi. Sebagian besar dari pegawai khususnya yang ditempatkan dibidang keuangan/akuntansi sudah dapat menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca, selain itu pegawai dari setiap SKPD juga sebagian besar sudah memahami peraturan dan ketentuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini juga terlihat bahwa dalam penempatan pegawai tidak berdasarkan bidang keahlian masing-masing pegawai, dimana masih banyak pegawai di setiap SKPD yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, seperti pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang ditempatkan dibagian umum dan administrasi, seharusnya ditempatkan dibidang keuangan/akuntansi sehingga menunjang kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara, hal ini menjelaskan bahwa rata-rata pegawai di setiap SKPD pernah mengikuti kegiatan pelatihan

tentang pelaporan keuangan sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dalam setahun, artinya setiap pegawai mengikuti pelatihan tentang pelaporan keuangan dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan sekali. Jumlah tersebut dinilai cukup memadai ditinjau dari beban kerja pegawai cukup tinggi harus dikerjakan oleh pegawai dibagian keuangan/ akuntansi setiap harinya.

Untuk bidang pelatihan yang sering diikuti adalah sebagian besar pegawai mengikuti pelatihan dibidang akuntansi, hal ini sangat relevan dan menunjang terciptanya kualitas laporan keuangan walaupun intensitas pelatihan yang mereka ikuti berlokasi diinstansi sendiri dengan jangka waktu 2 hari sampai dengan 3 hari. Kualitas pelatihan sangat ditentukan oleh bidang pelatihan yang diikuti, materi pelatihan yang sesuai dan metode pelatihan yang tepat.

Pelatihan juga perlu diadakan di luar kota atau luar daerah, hal ini perlu dilakukan sebagai penyegaran pola pikir pegawai juga untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai tentang proses penyusunan laporan keuangan dengan membandingkan dengan daerah lain yang sudah maju dan berkualitas tinggi.

Kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah juga dipengaruhi oleh lama pengalaman kerja, hal ini menjelaskan bahwa rata-rata pengalaman kerja pegawai di setiap SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara khususnya dibidang keuangan adalah diatas 7 tahun., namun demikian ada juga pegawai yang memiliki pengalaman kurang dari 7 tahun yaitu pegawai mutasi dari kabupaten lain atau instansi lain di kabupaten Aceh Utara.

Pengalaman kerja profesional memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana bidang pengalaman ilmu lain selain bidang keuangan/akuntansi juga memiliki relevansi dan keterkaitan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hubungan variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai adalah untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur pemerintah terutama pegawai dibagian pelaporan keuangan disetiap satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan yang ditetapkan di dalam standar akuntansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara simultan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah kabupaten Aceh Utara.
2. Secara parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah kabupaten Aceh Utara.

Saran

1. Dalam rekrutmen pegawai khususnya yang ditempatkan di bagian keuangan dan akuntansi diprioritaskan untuk lulusan sarjana ekonomi bidang akuntansi agar lebih sesuai dengan tugas, fungsi, bidang pekerjaan masing-masing pegawai.

2. Dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama pegawai dibagian keuangan/akuntansi perlu diprogramkan bidang pelatihan dan penataran pegawai sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harrun Al-Rasyid. 1999. *Dasar-Dasar Statistika Terapan*, Program pascasarjana, Unpad Bandung.
- Henry Simamora. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta. Salemba Empat.
- Malaya Hasibuan. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo, 2003, 'Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah', Makalah Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-8 MEP UGM Yogyakarta.
- , 2004, 'Tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Menuju Indonesia Baru', Makalah Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Sulawesi Selatan.
- , 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nirwana SK Sitepu. 1994. *Analisis Jalur*. Diktat Jurusan Statistika. FMIPA. Universitas Padjajaran.
- Nunuy Nur Afiah. 2009. *Akuntansi pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- , *Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Bandung.
- , *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Terjemahan Kwan Men Yon. Jilid satu. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

Tjutju Yuniarsih. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.